

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

Angkasa, Filsafat Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.

Bono, Numpuno, Hanjoyo dkk, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru, Tim Pandom Media Nusantara, Jakarta, 2014

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Jilid I, Djambatan. 2008.

Hasni, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR- UUPLH, edisi ketiga, Rajawali Pers. Jakarta, 2016.

Hatta, Mohammad, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Media Abadi, Yogyakarta, 2005.

Hutagalung, Arie Sukanti, & Markus Gunawan., Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2008.

Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede., The Legal Source of Public Policy, Lexington Books, D.C. Health and Company, Lexington-Massachusetts-Toronto. 1977.

Jayadinata, Johara T., Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Dan Perkotaan, Dan Wilayah. Bandung: ITB. 1986

Konsorsium Pembaharuan Agraria, Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria. 2019

Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2013

- Logan, R.G., Legal Literature and Law Libraries, dalam R.G. Logas, Information Sources in Law, Butterworth Guide to International Sources, Butterworth & Co. Publisher Ltd. 1986.
- Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, h. 154-555 dalam Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta. 2005
- McAuslan, Patrcik., Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1986.
- Mulyosudarmo, Suwoto, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga. Surabaya, 1990
- Poggi, Gianfranco, The Development of the Modern State “Sociological Introduction, California: Standford University Press. 1992
- Purbacaraka, Purnadi dalam A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Puspasari, Sofi & Sutaryono, Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang, Yogyakarta, STPN Press. 2017.
- Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang, PT.Nuansa. Bandung, 2016.
- Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo. Yogyakarta, 2011.
- Sandi, I Made, “Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan UUPA.” Jurnal CSIS, Tahun XX, No. 2. 1991
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional., Pokok-Pokok Usulan STPN; Transformasi Kelembagaan dan Revolusi Mental: Dari Badan Pertanahan Nasional

Menuju Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;  
Yogyakarta. 2017

Setiardja, A. Gunawan, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Yogyakarta, Kanisius, 1990.

Shohibuddin dan Salim, Muhammad Nazir. Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara Press, Yogyakarta, , 2012.

Soemardjan, Selo., "Land Reform in Indonesia", dalam Asian Survey, Vol. I, No. 12. 1962.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Methodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1988

Soenarko, Susunan Negara Kita, Jakarta. 1951

Soeromihardjo, Soedjarwo, Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria, Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional, Cerdas Pustaka, Jakarta. 2009.

Sutaryono, 'Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah', Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta. 2007

Wiradi Gunawan, "Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria", Yogyakarta, STPN Press. 2009.

Yamin, M., Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta. 1959.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Amandemen IV

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara 1960 – 104

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No.25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2015-2019.

## **Jurnal**

Azas Ismail, Hufron, Sri Setyadji., Volume 4 Nomor 3 Edisi Agustus 2019 . Materi Muatan Menampung Kondisi Khusus Daerah Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal AKRAB JUARA.

Enemark, Stig., 2007. Land Management in Support of Global Agenda. International Congress GEOMATICA 2007: “Geomatics for the Development”.

Nasution, Krisnadi., Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020. Penggunaan Keterangan Perusahaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Surabaya.

## **Website**

<https://www.atrbpn.go.id/>

<http://www.penataanruang.com/>

<https://www.kpa.or.id/>

<https://historia.id/>